

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah penulis paparkan disetiap bab-bab maka penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan Pasal 22, selanjutnya disingkat menjadi PPh Pasal 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pada umumnya, PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah, PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian.

2. Salah satu objek pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah atas pembelian bahan-bahan berupa hasil perkebunan, pertanian, perternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir. Untuk tarif Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan hasil perkebunan adalah :

- a. $0,25\% \times \text{harga pembelian}$, jika mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- b. $0,50\% \times \text{harga pembelian}$, jika tidak mempunyai NPWP

3. Untuk saat ini yang sudah dilaksanakan adalah setiap pembelian lebih dari Rp. 20.000.000 per transaksi/ per pembayaran akan terkena PPh 22 sebesar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

0,25% bagi petani yang memiliki NPWP dan 0,50% bagi petani yang tidak memiliki NPWP, hal tersebut tetap berjalan sampai ada surat penegasan tertulis dari KPP Pratama Rengat tentang pembelian lebih dari Rp. 20.000.000 perbulan

4. Untuk melakukan pembayaran pajak PPh Pasal 22 PT. Pulau Sambu ke KPP, harus melalui syarat yang ditetapkan.
 - a. Membuat E-Billing
 - b. Penyetoran melalui bank persepsi atau kantor pos
 - c. Membuat bukti potong
5. PT. Pulau Sambu Kuala Enok tersebut menjadi salah satu perusahaan yang berkontribusi kepada para petani atau pedagang pengumpul untuk membeli hasil dari perkebunan langsung kepada mereka.

4.2 Saran

Berikut ini beberapa saran yang penulis ajukan, adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut:

1. Agar perusahaan terus beroperasi dalam pembelian kelapa untuk hasil produksi atau untuk menjualnya kembali kepada customer lain, baiknya lebih meningkatkan lagi untuk mencari kelapa ke beberapa petani atau pedagang pengumpul yang mempunyai hasil perkebunan kelapa yang sangat bagus
2. Pada saat melakukan pembayaran pajak ke KPP diharapkan departemen atau karyawan yang melakukan kewajiban tersebut melakukan pembayaran tepat sebelum tanggal berakhir agar tidak ada denda atau peringatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penulis berharap perusahaan lebih mengedepankan kualitas produk untuk hasil produksi serta meningkatkan kepatuhan atau kejujuran untuk perusahaan agar bisa lebih terdepan.
4. Dalam melakukan pembayaran atau penyetoran pajak, sebaiknya diisi lengkap, jelas, benar secara formal ataupun material, dan ditanda tangani oleh pemimpin atau pejabat yang ditunjuk oleh PKP sesuai dengan peraturan yang berlaku. Harus dicek kembali agar tidak terjadi kesalahan dan pembetulan pada Masa Pajak Tertentu.
5. Melakukan pembaharuan agar server tidak menjadi lambat atau loading lama dan lebih meningkatkan kualitas jaringan pada PT. Pulau Sambu Kuala Enok.